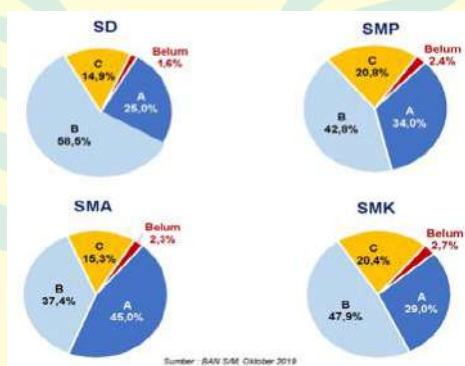


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional merupakan salah satu program yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun daerah, hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan mutu kepada para *stakeholders* pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan ini dapat berdampak kepada peningkatan sumber daya manusia secara nasional. Salah satu indikator dari mutu pendidikan yaitu dapat dilihat dari akreditasi sekolah tersebut. Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) sebagai berikut:



Gambar 1.1 Akreditasi Sekolah

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merekomendasikan kepada pemerintah untuk menutup sebanyak 114 Sekolah pada tahun 2020. Dalam hasil *Assessment* tahun ini BAN-S/M juga merekomendasikan 46 sekolah untuk digabung dan 1.256 sekolah di bina. Semua sekolah tersebut berstatus tidak terakreditasi (Chodidjah, 2020). Di tingkatan SMK masih terdapat 2,7 % Sekolah yang belum terakreditasi dan 20,4% yang memiliki akreditasi C. Jenis Sekolah yang diharapkan memenuhi tenaga kerja tingkat menengah yaitu SMK. Sebagai penyelenggara pendidikan kejuruan yang harus mengutamakan

pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar kerja.

Dalam proses penilaian akreditasi menggunakan standar nasional pendidikan yaitu delapan komponen standar nasional Pendidikan. Poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyesuaikan diri untuk memenuhi kekurangan guru produktif dengan menambah kapasitas para guru yang tersedia. Pada 2016, Indonesia masih kekurangan guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejumlah 91.86,1 dengan rincian 41.293 di SMK Negeri dan 148.088 di SMK Swasta (Effendy, 2018).



Gambar 1.2 Data guru SMK

Untuk memenuhi kekurangan itu, pemerintah menambah guru produktif SMK melalui Program Keahlian Ganda, *outsourcing* guru dari dunia usaha (DU) maupun dunia industri (DI), Program Mahasiswa Magang, dan Rekrutmen guru baru pegawai negeri sipil (PNS). Kekurangan guru produktif dialami hampir di setiap provinsi, seperti hasil penelitian yang dilakukan di delapan provinsi yaitu Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Responden meliputi Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pengembangan P4TK yang menyelenggarakan program keahlian ganda, Instruktur P4TK, Kepala sekolah SMK, guru peserta program

keahlian ganda dan dinas yang terkait di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Badan Kepegawaian Daerah.

Tabel 1.1 Hasil Rangkuman Data untuk kebutuhan guru produktif di 8 provinsi

Rata-rata Prediksi kebutuhan Guru 4 tahun mendatang untuk tiap sekolah	27 guru
Rata-rata jumlah kekurangan guru saat ini untuk tiap sekolah	13 guru
Rata-rata prosentase kekurangan guru produktif saat ini untuk tiap sekolah dari total kebutuhan	12,96 %

*Sumber : data primer diolah dari 29 responden, 2017*

Berdasarkan responden Dinas Pendidikan Provinsi, 25 % yang memberikan jawaban, menyatakan rata-rata kekurangan guru produktif adalah 31.3 % dari total kebutuhan. Persentase kekurangan guru produktif yang cukup tinggi, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan di antaranya Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang disusul dengan nota kesepahaman antar kementerian terkait. Fenomena ini menjadi tumpukan energi yang seketika mampu mendorong sekaligus melecutkan pendidikan vokasi di negeri ini terbangun dari tidur. Juga menyadarkan bahwa pendidikan vokasi sangat dibutuhkan di negeri ini dan harus mendapat perhatian serius. Sebagian orang berpandangan, kebangkitan pendidikan vokasi kali ini menjadi reformasi pendidikan kejuruan ketiga, setelah reformasi pendidikan kejuruan pertama tahun 1964, dan reformasi kedua tahun 1976.

Inpres dikeluarkan lantaran Presiden Joko Widodo melihat bangsa Indonesia menghadapi tantangan global akibat Revolusi Industri 4.0 di Abad XXI. Revolusi industri 4.0 adalah revolusi industri keempat, dengan konsekuensi pendekatan dan kemampuan baru diperlukan untuk membangun sistem produksi yang inovatif dan berkelanjutan. Gelombang besar Revolusi Industri 4.0 membiakkan teknologi disruptif yang luar biasa dahsyat dan membuat turbulensi kehidupan baru, serta

persaingan global yang semakin berat. Teknologi disrupti merupakan inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia bulan Agustus 2019 turun menjadi 5,28%, walaupun turun ada beberapa hal yang memprihatinkan, salah satunya TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masih tinggi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka TPT bulan Agustus 2019. Berdasarkan jenjang pendidikannya TPT lulusan SMK berada di 10.42% (Suhariyanto, 2019). Hal ini dapat terjadi dikarenakan terjadinya *mismatch dan under qualification*. Hal ini tidak sejalan dengan harapan pemerintah yang dimana dengan mata pelajaran yang lebih spesifik seharusnya dapat lebih mudah terjadi penyerapan lapangan kerja. Inilah tantangan terberatnya. Sehingga revitalisasi SMK diharapkan dapat mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia yang bermuara pada kualitas tenaga kerja yang disiapkan. Kenyataan menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia yang sekarang statistiknya masih menggelembung di tingkat bawah dengan tingkat pendidikan mayoritas pendidikan dasar.

Selain itu diharapkan pula memberi dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK dengan dua orientasi baru. Pertama, mengantisipasi datangnya gelombang Revolusi Industri 4.0 dengan segala teknologi disrupti yang menyertainya, dan kedua, orientasi pengembangan keunggulan potensi wilayah sebagai keunggulan nasional untuk menciptakan daya saing bangsa. Pilar pertama memperkuat jalinan SMK dengan dunia usaha dan industri Abad XXI, pilar kedua mendongkrak keunggulan lokal menjadi keunggulan global. Terdapat enam isu strategis yang menjadi prioritas revitalisasi SMK, yakni

- 1) Penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum;
- 2) Inovasi pembelajaran;
- 3) Pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan;
- 4) Kemitraan sekolah dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan perguruan tinggi;
- 5) Standarisasi sarana dan prasarana utama dan
- 6) Penataan/pengelolaan kelembagaan

Sebagai negara kepulauan dengan luas perairan hampir mencapai 70% wilayah, sektor maritim menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Indonesia. Tak heran jika dalam sektor kelautan diperlukan pasokan tenaga kerja maritim yang memadai (Apriliyadi, 2019). Tidak hanya dari sisi jumlah, namun juga dari aspek kualitas harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri maritim. Sayangnya, pasokan tenaga kerja lulusan sekolah pendidikan kelautan dengan sertifikasi internasional saat ini masih sangat terbatas. Kementerian Perhubungan pada 2019 mencatat kebutuhan pelaut global per tahun mencapai 65.748 orang, sedangkan kebutuhan pelaut domestik per tahun berkisar 4.498 orang. Untuk mengisi kebutuhan domestik, terlebih agar diserap pasar global yang demikian besar kebutuhannya, maka tenaga kerja maritim Indonesia wajib memiliki kompetensi dan sertifikasi yang juga berstandar internasional. Seperti memenuhi *standards of training, certification of watchkeeping (STCW)* 2010 dari International Maritime Organization.

Seseorang dikatakan profesional harus memiliki beberapa persyaratan di antaranya kompetensi sesuai dengan pekerjaannya (Lester, 2017). Kompetensi adalah kombinasi kompleks dari pengetahuan, keterampilan, pemahaman, nilai, sikap dan keinginan yang mengarah pada tindakan manusia yang efektif dan diwujudkan dalam domain tertentu (Deakin Crick, 2006). Guru memiliki tugas yaitu berbagai informasi

dan dituntut ke profesionalitasnya dalam penggunaan media digital saat ini. Guru merupakan sebuah profesi berbagi informasi dituntut ke profesionalitas dalam bekerja terutama dalam penggunaan media digital saat ini (Prestridge & Tondeur, 2015). Perkembangan teknologi saat ini sudah tidak dapat dibendung lagi, di dalam proses pembelajaran siswa dan guru dituntut untuk dapat mengaplikasikannya (Burden et al., 2016; Gudmundsdottir & Hatlevik, 2018).

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) yang layak. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu tahapan dari sistem pendidikan di Indonesia, dalam proses pembelajarannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki keunikan yaitu 60% dari proses pembelajarannya adalah praktik, dan 40% adalah teori, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk menghasilkan *output* berupa siswa yang bisa bekerja secara profesional sesuai dengan keahliannya (Gokce, 2015). Dalam mewujudkan harapan itu, guru sebagai unit terkecil dari sebuah sekolah dituntut untuk meningkatkan perannya dalam proses pembelajaran di kelas dengan cara merancang, mengembangkan dan terus memperbaharui semua informasi yang terkait pembelajaran yang diterima sesuai dengan tuntutan pangsa pasar (Aðalsteinsson et al., 2014). Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utama tersebut guru juga dimungkinkan memiliki tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (Gultom, 2012).

UKG (Ujian Kompetensi Guru) merupakan sebuah kegiatan berupa ujian yang berfungsi untuk mengukur kompetensi dasar mengenai bidang studi atau *subject matter* dan juga pedagogik dalam domain seorang pengajar, dalam hal ini guru

sekolah. Khusus untuk guru yang sudah bersertifikat pendidik, maka kompetensi dasar yang akan diujikan akan disesuaikan dengan bidang studi sertifikasi tersebut. Selain itu, materi yang akan diujikan juga akan disesuaikan dengan kualifikasi akademik seorang guru bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk kompetensi pedagogik yang akan diujikan sendiri merupakan integrasi dari konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran dalam bidang studi yang diampu di kelas. Sebagai seorang pendidik profesional, guru memiliki peran utama dalam memberi pendidikan, mengajar, memberikan bimbingan, menilai, mengarahkan, melatih serta mengevaluasi peserta didik baik itu pada pendidikan anak usia dini dengan jalur formal, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah atas. UKG (Ujian Kompetensi Guru) sendiri memiliki kedudukan sebagai sarana kualifikasi untuk guru sebagai tenaga profesional. Berikut ini adalah hasil UKG guru SMK di Indonesia

Tabel 1.2. Nilai UKG Guru SMK Tahun 2019

No.	Provinsi	Pedagogik	Profesional	Rata-rata
1	Prov. D.K.I. Jakarta	56.74	65.09	60.915
2	Prov. Jawa Barat	54.36	60.95	57.655
3	Prov. Jawa Tengah	57.25	65.89	61.57
4	Prov. D.I. Yogyakarta	60.94	69.63	65.285
5	Prov. Jawa Timur	55.22	63.12	59.17
6	Prov. Aceh	46.37	49.17	47.77
7	Prov. Sumatera Utara	48.04	54.31	51.175
8	Prov. Sumatera Barat	54.04	60.23	57.135
9	Prov. Riau	51	57.01	54.005
10	Prov. Sumatera Selatan	48.82	53.4	51.11
11	Prov. Lampung	49.44	55.07	52.255
12	Prov. Kalimantan Barat	49.8	55.79	52.795
13	Prov. Kalimantan Tengah	48.41	53.23	50.82

14	Prov. Kalimantan Selatan	52.29	58.92	55.605
15	Prov. Kalimantan Timur	52.08	57.31	54.695
16	Prov. Sulawesi Utara	48.82	52.86	50.84
17	Prov. Sulawesi Tengah	47.08	51.44	49.26
18	Prov. Sulawesi Selatan	49.56	53.83	51.695
19	Prov. Sulawesi Tenggara	48	52.49	50.245
20	Prov. Maluku	46.23	47.88	47.055
21	Prov. Bali	54.91	62.36	58.635
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	49.42	53.66	51.54
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	48.27	51.24	49.755
24	Prov. Papua	47.34	49.84	48.59
25	Prov. Bengkulu	50.92	55.51	53.215
26	Prov. Maluku Utara	43.49	45.34	44.415
27	Prov. Banten	51.76	57.67	54.715
28	Prov. Bangka Belitung	54.54	61.02	57.78
29	Prov. Gorontalo	50.47	53.1	51.785
30	Prov. Kepulauan Riau	53.77	60.05	56.91
31	Prov. Papua Barat	47.73	50.21	48.97
32	Prov. Sulawesi Barat	47.29	51.38	49.335
33	Prov. Kalimantan Utara	50.89	53.59	52.24

Berdasarkan data di atas di temukan rata-rata kemampuan Guru SMK di Indonesia sebesar 53.30. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat peran guru dalam upaya membangun mutu sumber daya manusia sangat strategis., tak hanya guru, 70 persen dari total kepala sekolah juga belum memiliki kompetensi standar. Rendahnya kompetensi tersebut akibat dari guru dan kepala sekolah sudah tak tertarik dengan tantangan membangun SDM berkualitas (Seftiawan, 2019). Toran yang mengatakan bahwa kompetensi yang dimiliki seorang guru akan tercermin dari nilai kinerja yang diberikan pimpinan kepada dirinya (Toran, 2017).



Hal ini membuktikan bahwa kompetensi yang dimiliki guru Sangatlah penting dan memiliki dampak yang besar baik untuk kinerja dirinya maupun berdampak kepada kualitas lulusan anak didiknya (Walsh et al., 2018).

Melalui pendidikan salah satu cara meningkatkan kualitas warga negara Indonesia. Pendidikan erat kaitannya dengan kualitas gurunya (Barber, Mourshed, Company, Barber, & Mourshed, 2007), hal ini didukung oleh hasil riset yang dilakukan Hattie yang mengatakan bahwa kompetensi guru itu menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan (Hattie, 2018), 30% kualitas dari sekolah ditentukan oleh kompetensi guru (Cochran-Smith, 2005). Untuk terus meningkatkan kompetensi guru ada beberapa program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program pengajaran yang disiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan yang erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi (Barber et al., 2007).

Selain itu pelatihan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kompetensi, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Barnes yang mengatakan bahwa kualitas sekolah ditentukan oleh kualitas guru-gurunya dan untuk meningkatkan kompetensinya hal yang terbaik adalah dengan memberikan pelatihan kepada guru sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan unit kerjanya masing-masing (Barnes et al., 2018). Di dalam ruang lingkup Sekolah Menengah Pelayaran di Indonesia, lembaga yang berwenang dan berlisensi resmi dalam memberikan pelatihan yang terstandar dari IMO yaitu melalui Kementerian Perhubungan yang didelegasikan kepada BPSDM Kementerian Perhubungan.

Pelatihan yang diterima guru memiliki peran penting untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja dan memotivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Cooper dan Kaye yang membuktikan bahwa pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya kompetensi para

pegawai (Cooper & Allen, 2017; Kaye et al., 2010). Pelatihan itu sendiri adalah proses pendidikan berjangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh sebuah lembaga, tidak semua lembaga diizinkan mendirikan sebuah kegiatan pelatihan, lembaga tersebut pada umumnya adalah milik pemerintah yang di mana memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kualitas pegawai yang didiknya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui kompetensi guru menjadi persoalan utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kurangnya minat lulusan tersebut menjadi guru SMK menjadi salah satu faktor. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai upaya terobosan seperti Program Keahlian Ganda (PKG), guru Multi subjektif, dan perekrutan tenaga profesional untuk menjadi Guru SMK (Tarmizi, 2018).

Lembaga pendidikan pelayaran yang terdiri dari SMK dan akademi yang diselenggarakan masyarakat (swasta) dapat dibidang unik, karena tata kelola sekolah atau lembaga diatur oleh Kemendikbud, namun untuk standar kompetensi lulusannya harus mengikuti kriteria dari Kementerian Perhubungan. Para profesional yang kaya pengalaman akan diberikan pelatihan dan mengikuti ujian standar kompetensi setelah itu baru diberikan sertifikat mengajar. Pekerjaan *multitasking* dan sangat kompleks. Perbedaan individu utama di antara kelompok siswa yang mengikuti kelas yang sama menuntut pengajaran yang adaptif. Guru ditantang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dan untuk menyesuaikan pengajaran mereka dengan kemampuan akademis yang heterogen serta berbagai kepentingan dan motivasi (Brante, 2009). Guru ditantang untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar dan

menyesuaikan pengajaran mereka dengan kemampuan akademis yang heterogen serta berbagai minat dan motivasi (Vogt & Rogalla, 2009).

Guru di SMK Pelayaran terdiri dari guru normatif dan adaptif serta profesi. Untuk guru normatif dan adaptif, di bawah bimbingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan memiliki kapabilitas tinggi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Akan tetapi untuk tema pelayaran, belum tentu guru-guru normatif dan adaptif dapat memberikan materi tematik pelayaran kepada siswa. Untuk guru profesi, berasal dari pelaut yang sudah memiliki pengalaman berlayar kemudian memiliki keinginan untuk memajukan pendidikan pelayaran dengan mengajar calon pelaut muda di sekolah baik SMK maupun Akademi.

Hal ini sudah tertuang juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut, Pasal 12 ayat 4 yang menyebutkan Dalam rangka menjamin mutu pelaut Indonesia, lembaga pendidikan ke pelautan yang menyelenggarakan diklat ke pelautan, dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan di dalam pasal 1 bahwa, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pelatihan melek huruf melibatkan kerja emosional yang kompleks dalam ruang fisik dan ideologis tempat para pelatih dan guru berinteraksi. Harapan untuk pelatih keaksaraan sangat bervariasi dalam dan lintas konteks, dan karena itu mereka melakukan banyak tugas berbeda yang berkaitan dengan memfasilitasi pembelajaran guru, termasuk mengamati dan

melakukan pembekalan praktik kelas, menyediakan sumber daya kurikuler, menerapkan pengembangan staf, dan mendukung agenda reformasi keaksaraan.

Sekolah Menengah Kejuruan bidang pelayaran merupakan sekolah yang unik, karena melibatkan industri dalam proses pembelajaran agar upaya *transfer knowledge* berjalan baik. Salah satu kunci dalam mencetak lulusan yang kompeten serta *link and match* sesuai kebutuhan adalah hadirnya guru yang memiliki kapabilitas tinggi serta profesional. Profesional dalam arti guru memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup pada industri pelayaran, sedangkan kapabilitas tinggi diartikan guru tersebut memiliki kemampuan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa untuk memahami dengan menggunakan berbagai metode atau cara.

Lembaga pendidikan pelayaran yang terdiri dari SMK dan akademi yang diselenggarakan masyarakat dapat dibilang unik (J. Fan et al., 2018), karena tata kelola sekolah atau lembaga diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan namun untuk standar kompetensi lulusannya harus mengikuti kriteria dari kementerian teknis (Kementerian Perhubungan). Perlu disadari memang bahwa sinergi guru normatif dan adaptif yang memiliki kapabilitas tinggi dan paham tentang dunia pelayaran serta guru profesi yang memiliki pengalaman berlayar di industri pelayaran yang mampu menyampaikan materi pembelajaran sesuai kurikulum internasional adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lulusan SMK agar dapat berkiprah di industri pelayaran. Berdasarkan data di lapangan pelatihan dari Kementerian Perhubungan yang dirasa kurang yaitu tentang sarana dan prasarana serta pemenuhan tenaga pendidik. Hal ini terjadi karena banyak faktor dan ini dapat berpengaruh kepada penurunan kompetensi para guru dalam mengajar.

Ketentuan atau syarat minimal jumlah guru di setiap jurusan SMK Pelayaran berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 140 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 70 tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut. Rasio tenaga pengajar sekurang-kurangnya 1:30. Pada kenyataannya banyak guru produktif tidak memiliki latar belakang kompetensi ke pelautan yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Ahli Nautika dan Teknik. Guru produktif adalah guru yang mengajarkan bidang tertentu yaitu bidang khusus. Guru adaptif adalah guru yang mengajarkan kemampuan dasar misalnya matematika, kimia, biologi dan guru normatif adalah guru yang mengajarkan pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan BK

Sinergi pengawasan dari kepala sekolah yang merupakan manajer di lapangan dalam kompetensi mengajar guru serta pelatihan dari Kementerian Perhubungan yang memiliki akses ke industri dan organisasinya serta mengetahui perubahan regulasi dan teknologi yang berkembang dan mempengaruhi industri pelayaran sangat diperlukan agar kompetensi guru tetap tinggi pada khususnya dan kualitas lulusan yang baik dan terserap lapangan pada umumnya yang akan membangun dan meningkatkan ekonomi Indonesia dan tujuan pemerintah agar Negara Republik Indonesia menjadi poros maritim dunia tercapai.

Berdasarkan dari pengawasan dari kepala sekolah ada temuan bahwa banyak guru pada proses pembuatan perencanaan pembelajaran belum mengacu kepada *International Maritime Organization Model Course* yang diprasyartkan oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini sangat disayangkan karena selain dapat menjadikan penurunan kualitas lulusan dan dapat merugikan siswa. Permasalahan ini sebenarnya dapat di atasi dengan cara memberikan pelatihan yang sesuai dan tepat, bahwa pelatihan yang tepat dapat meningkatkan kompetensi guru (Bengo, 2016).

Pelatihan yang dapat diberikan seperti pelatihan kognitif, pelatihan instruksional bergantung pada kemampuan pelatih untuk mengetahui perspektif guru dan mendengarkan dengan seksama pelatihan percakapan yang berdampak kepada kompetensi guru. Kompetensi dapat dipengaruhi banyak hal salah satunya adalah motivasi kerja, dengan motivasi kerja yang tinggi dapat berdampak kepada kompetensi seseorang dalam bekerja (C. D. Fisher, 1978). Motivasi adalah dorongan dari dalam atau luar diri guru untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Di sisi lain guru diharapkan membangun hubungan kerja sama dengan para pelatih terkait seperti BPSDM Kementerian Perhubungan yang membidangnya, hal ini akan berpengaruh kepada kualitas guru dalam mengajar para siswanya. Selain itu proses pelatihan yang tersistem dan berkelanjutan dapat membantu para guru untuk menjaga kompetensinya (Atteberry & Bryk, 2011). Pelatihan yang diberikan kepada guru berdampak kepada peningkatan sebesar 50% terhadap peningkatan kompetensi guru (Jacobs et al., 2017). Pelatihan guru merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, karena pelatihan guru mengarah kepada peningkatan unjuk kerja yang merupakan fungsi dari karakteristik individu guru yaitu yang meliputi sikap, keinginan, kemampuan dan motivasi. Pelatihan guru dimulai dengan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, menemukan kelemahan atau masalah-masalah yang dihadapi guru.

Berdasarkan uraian dan data yang ditemukan di lapangan, kompetensi guru SMK Pelayaran memiliki peran yang sangat strategis, selain itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi guru dalam melaksanakan kewajibannya, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mempelajari lebih mendalam untuk menemukan solusi permasalahan 6. yang memiliki sertifikat *TOT Model Course 6.09* di Negara Indonesia ini.

## B. Pembatasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka penelitian ini dibatasi pada upaya mengungkap pelatihan, pengawasan dan motivasi kerja terhadap kompetensi Guru SMK Pelayaran di Indonesia.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung pelatihan terhadap kompetensi guru SMK Pelayaran di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung pengawasan terhadap kompetensi guru SMK Pelayaran di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kompetensi guru SMK Pelayaran di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh langsung pelatihan terhadap motivasi kerja guru SMK Pelayaran di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh langsung pengawasan terhadap motivasi kerja guru SMK Pelayaran di Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap kompetensi guru SMK Pelayaran di Indonesia melalui motivasi kerja?
7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap kompetensi guru SMK Pelayaran di Indonesia melalui motivasi kerja?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini berawal dari *GAP Research* dan *GAP Teori* yang peneliti ungkapkan di latar belakang yang menjelaskan adanya kesenjangan terkait kompetensi guru SMK Pelayaran yang ada di Negara Indonesia. Permasalahan ini kait eratannya dengan mutu lulusan dari sekolah tersebut yang dimana dapat melahirkan permasalahan yang lain. Melalui Penelitian ini peneliti akan melakukan identifikasi, merumuskan dan menganalisis apa yang menjadi faktor dominan pembentukan kompetensi Guru SMK Pelayaran dengan mengkaji baik secara teoritis dan empiris.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis yang diharapkan hasil penelitian ini adalah dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, terutama menyangkut objek dan upaya atau cara yang dilakukan berkenaan dengan kompetensi guru SMK Pelayaran di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan menjadi masukan dalam membuat sebuah kebijakan mengenai persyaratan untuk menjadi guru SMK Pelayaran di Republik Indonesia.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru SMK Guru Pelayaran.



#### **F. Kebaruan Penelitian (*State of the art*)**

Di dalam penelitian ini diajukan beberapa hal yang baru di antaranya:

1. Belum pernah ditemukan penelitian yang melibatkan guru produktif di SMK Pelayaran di Indonesia yang memiliki sertifikat *TOT Model Course 6.09*.
2. Di dalam pemecahan permasalahan terkait kompetensi guru SMK Pelayaran di lihat dari sudut pandang di antaranya: Pelatihan yang diberikan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pengawasan yang dilakukan kepala sekolah SMK Pelayaran dan Motivasi kerja guru.
3. Melibatkan 2 Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Menggunakan alat ukur (instrumen) yang baru dengan dasar beberapa teori dan konsep yang dikemukakan ahli sesuai dengan bidang keahliannya.

